



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI**

JALAN PANTAI PRIGI, TRENGGALEK 66382 JAWA TIMUR  
TELEPON (0355) 551147, EMAIL [ppnprigi@gmail.com](mailto:ppnprigi@gmail.com)  
LAMAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi>

**KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI**  
**NOMOR : B.807/PPNP/TU.210/IV/2021**  
**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI**  
**TAHUN 2020-2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai sasaran strategis serta guna mewujudkan visi dan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berbasis *balanced scorecard* (BSC), perlu disusun Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tentang Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI TENTANG RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RENSTRA PPN Prigi Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelabuhan ini.
- KEDUA : Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi setiap tahunnya pada periode tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2020-2024 sebagaimana diktum KETIGA, dilakukan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pelabuhan ini dibebankan pada anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.
- KEENAM : Keputusan Kepala Pelabuhan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 7 April 2021

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi



Antonius Budi Utomo S.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2020 – 2024  
REVISI - 1**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) PPN Prigi tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan agar membuat Renstra sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang dalam penyusunannya mengacu kepada Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Presiden No.63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas masukan, saran, pemikiran, dan tenaganya sehingga berhasil membuahkan dokumen Renstra ini. Semoga perikanan tangkap Indonesia semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Trenggalek, April 2021  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Prigi  
  
Antonius Budi Utomo S.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. KONDISI UMUM .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>6</b>
A. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .....	6
B. PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP .....	9
C. PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PRIGI.....	12
<b>BAB III. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....</b>	<b>21</b>
A. POTENSI.....	21
B. PERMASALAHAN.....	22
C. LINGKUNGAN STRATEGIS .....	23
<b>BAB IV. KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN .....</b>	<b>25</b>
A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	25
B. PROGRAM PEMBANGUNAN .....	27
C. KERANGKA PENDANAAN.....	27
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>28</b>

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu untuk “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan focus-fokus pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu terdiri atas :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan ketujuh agenda pembangunan tersebut, khususnya agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu berpotensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80%

dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha baru mencapai sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (data sementara) atau baru 69,59% dari JTB. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada akhir 2019.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju, serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

## **B. KONDISI UMUM**

Pengembangan, pembangunan, serta pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan salah satu program pembangunan perikanan tangkap. Pelabuhan perikanan memegang peranan yang strategis dalam pengembangan usaha perikanan laut maupun pengembangan masyarakat nelayan. Hal tersebut dimungkinkan karena pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas masyarakat perikanan yang didalamnya terdapat interaksi antar kelompok masyarakat perikanan.

Capaian pembangunan perikanan tangkap tahun 2015-2019 didasarkan pada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pembangunan perikanan tangkap memiliki 3 (tiga) sasaran strategis utama yakni : 1) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan; 2) Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, serta; 3) Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis PPN Prigi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu secara periodik, melalui serangkaian program dan kegiatan tahunan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Tangkap dan beberapa pertimbangan lain diantaranya peluang, potensi, permasalahan, dan kewenangan yang dimiliki PPN Prigi. Sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPN Prigi terletak di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur pada posisi koordinat 1110 43' 58" dan 80 17' 22" LS. Wilayah Kerja

Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ditetapkan oleh Bupati Trenggalek sesuai SK Bupati Trenggalek Nomor 872 tahun 2006 tanggal 24 November 2006 dan dikuatkan oleh SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.09/MEN/2009 tanggal 29 Januari 2009.

PPN Prigi mempunyai visi terwujudnya pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan usaha perikanan di selatan Jawa Timur yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan. Sedangkan misi PPN Prigi yaitu 1) Mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan fasilitas dalam rangka pelayanan masyarakat meliputi operasional kapal perikanan, penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan; 2) Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dengan menyediakan kualitas ikan hasil tangkapan yang memenuhi standar mutu; 3) Mewujudkan konektivitas / jejaring antar pelabuhan perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan ikan; serta 4) Menyediakan sistem data dan informasi perikanan tangkap yang akurat dan terkini. Adapun dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

- 1) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- 2) PP Nomor 75 tahun 2015 tentang Pembaharuan PP No 19 tahun 2006 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.09/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian PPN Prigi;
- 4) PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor PER-08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
- 5) PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor PER-03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- 6) PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.

Berdasarkan PERMEN KP No. 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelabuhan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Selain itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan bidang pelabuhan perikanan;
- 2) Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;

- 4) Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book* Penangkapan Ikan;
- 5) Pelaksanaan pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar;
- 6) Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- 7) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 8) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- 10) Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- 11) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- 12) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
- 13) Melaksanakan Inspeksi Pengendalian Mutu;
- 14) Melaksanakan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Maka, sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas, PPN Prigi dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Pelabuhan perikanan sebagai salah satu Kawasan *Eco Fishing Port*, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup DJPT yang berkaitan

dengan kebijakan di UPT PPN Prigi secara implisit juga menjadi tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2020-2024 adalah merupakan arah dan pedoman pengembangan dana operasional guna mencapai hasil yang diinginkan dalam periode kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis diuraikan kedalam program dan kegiatan dengan memperhitungkan peluang, tantangan, ancaman, dan hambatan yang mungkin terjadi.

Rencana Strategis juga merupakan komitmen organisasi dan sekaligus diharapkan mampu memberikan motivasi dan petunjuk kepada *stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas operasional pelabuhan.

## **BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

### **A. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **1. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

#### **2. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia (misi 1) melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing (misi 2), melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
- c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan (misi 4), melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP.

#### **3. Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu :

- a. Peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan, yakni :
  - 1) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan
  - 2) Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
- b. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, yakni :

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  - 2) Meningkatkan mutu, daya saing, dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
  - 3) Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - 4) Meningkatnya system perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, dan
  - 5) Optimalnya pengelolaan ruang laut.
- c. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dengan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - d. Peningkatan tata kelola pemerintah di KKP, dengan tujuan meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi.

#### **4. Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Sasaran stretegis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome / impact* dari berbagai program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP 2020-2024 sebagai berikut :

- a. SS-1 “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP), dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.
- b. SS-2 “Ekonomi sector kelautan dan perikanan meningkat” dengan indikator kinerja :
  - 1) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan, dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
  - 2) Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
  - 3) Konsumsi ikan dari 56,59 kg/kapota/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.
- c. SS-3 “Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan” dengan indikator kinerja :
  - 1) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman, dari  $\leq 64\%$  pada tahun 2020 menjadi  $\leq 80\%$  pada tahun 2024; dan
  - 2) Luas kawasan konservasi perairan dari 23,40 ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.

- d. SS-4 “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat” dengan indikator kinerja :
- 1) Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dari 60% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
  - 2) Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama 2020-2024.
- e. SS-5 “Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.
- f. SS-6 “Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab” dengan indikator kinerja :
- 1) WPPNRI menjadi model percontohan penguatan tata Kelola, dari 3 (tiga) WPPNRI pada tahun 2020 menjadi 11 (sebelas) WPPNRI pada tahun 2024;
  - 2) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 (dua puluh empat) Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi 12 (dua belas) Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
  - 3) Persentase kepatuhan (*Compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.
- g. SS-7 “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing” dengan indikator kinerja :
- 1) Produksi perikanan dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024.
  - 2) Produksi garam nasional dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
  - 3) Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil dari Rp 2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 4,2 triliun pada tahun 2024; dan
  - 4) Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan dari 5 (lima) Kawasan pada tahun 2020 menjadi 50 (lima puluh) Kawasan pada tahun 2024.

- h. SS-8 “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif”, dengan indikator kinerja :
  - 1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
  - 2) Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, 93% pada tahun 2020 hingga tahun 2024;
  - 3) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.
- i. SS-9 “Tata Kelola pemerintahan yang baik”, dengan indikator kinerja :
  - 1) Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP, dari 71 (tujuh puluh satu) pada tahun 2020 menjadi 75 (tujuh puluh lima) pada tahun 2020; dan
  - 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024.

## **B. PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP**

### **1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Visi DJPT tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

### **2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap.
- c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata Kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

### 3. Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi DJPT, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

- a. Peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
- b. Peningkatan kontribusi ekonomi subsector perikanan tangkap, yaitu :
  - 1) Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasional pelabuhan perikanan;
  - 2) Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; dan
  - 3) Mengakselerasi reformasi tata Kelola perizinan usaha perikanan tangkap.
- c. Peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI; dan
- d. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

### 4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sasaran program perikanan tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJPT sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Program DJPT 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Kesejahteraan nelayan meningkat, untuk mendukung SS-1 KKP (kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat).  
Indikator kinerja : Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indkes), dengan target 102 (seratus dua) pada tahun 2020 menjadi 107 (seratus tujuh) pada tahun 2024.
- b. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, untuk mendukung SS-3 KK (Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan)  
Indikator kinerja : proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman (persen), dengan tingkat  $\leq 64$  pada tahun 2020 menjadi  $\leq 80$  pada tahun 2024.
- c. Tata Kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggungjawab, untuk mendukung SS-6 KKP (Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab).

Indikator kinerja : WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata Kelola (WPPNRI), dengan target 3(tiga) pada tahun 2020 menjadi 11 (sebelas) pada tahun 2024.

- d. Produktivitas perikanan tangkap meningkat, untuk mendukung SS-7 KKP (Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing).

Indikator kinerja yaitu :

- 1) Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton), dengan target 8.020 pada tahun 2020 menjadi 10.105 pada tahun 2024.
- 2) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab DJPT (skala kemandirian 1-5) dengan target 4 (empat) pada tahun 2020 menjadi 4 (empat) pada tahun 2024.

- e. Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DJPT, untuk mendukung SS-9 KKP (Tata Kelola pemerintahan yang baik).

Indikator kinerja yaitu :

- 1) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPT (nilai), dengan target 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024;
- 2) Indeks Profesionalitas (IP) ASN DJPT (indeks), dengan target 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024;
- 3) Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Dirjen Perikanan Tangkap (satker), dengan target 8 (delapan) pada tahun 2020 menjadi 12 (dua belas) pada tahun 2024;
- 4) Batas nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (persen), dengan target  $\leq 1$  pada tahun 2020 menjadi  $\leq 1$  pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP DJPT (nilai), dengan target 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 85,75 (delapan puluh lima koma tujuh puluh lima) pada tahun 2024;
- 6) Level maturase SPIP DJPT (level), dengan target 3 (tiga) pada tahun 2020 menjadi 3 (tiga) pada tahun 2024;
- 7) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen), dengan target 82 (delapan puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024;

- 8) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPT (persen), dengan target 60 (enam puluh) pada tahun 2020 menjadi 80 (delapan puluh) pada tahun 2024;
- 9) Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja), dengan target 1 (satu) pada tahun 2020 menjadi 1 (satu) pada tahun 2024;
- 10) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPT (nilai), dengan target 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2020 menjadi 90 (Sembilan puluh) pada tahun 2024; dan
- 11) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPT (nilai), dengan target 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 89 (delapan puluh Sembilan) pada tahun 2024.

## **C. PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PRIGI**

### **1. Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi**

Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

### **2. Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi**

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan 4 (empat) misi Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan uraian sebagai berikut :

#### **a. Misi 1 – Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**

Penumbuhan kewirausahaan dan fasilitasi akses pendanaan modal bagi nelayan

#### **b. Misi 2 – Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**

- 1) Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dengan menyediakan kualitas ikan hasil tangkapan yang memenuhi standar mutu;
- 2) Mewujudkan konektivitas/jejaring antar pelabuhan perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan ikan; serta
- 3) Fasilitasi pelaksanaan revitalisasi industri perikanan tangkap dan penyediaan serta pemanfaatan infrastruktur/fasilitas Pelabuhan Perikanan untuk menyongsong revolusi industri 4.0

- c. Misi 3 – Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan  
Menyediakan sistem data informasi pengelolaan perikanan tangkap yang akurat dan terkini.
- d. Misi 4 - Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya  
Reformasi birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

### **3. Tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi**

Menjabarkan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, maka tujuan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap, yaitu penumbuhan kewirausahaan dan fasilitasi akses permodalan bagi nelayan, penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan;
- 2) Membangun struktur ekonomi perikanan tangkap yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, yaitu pembangunan sektor ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui fasilitasi pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi, peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
- 3) Mencapai lingkungan hidup sumber daya perikanan yang berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan, menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan perikanan tangkap yang akurat dan terkini serta mendukung implementasi konsep *eco-infrastructure*.
- 4) Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya di lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

#### 4. Sasaran Program Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi

Sasaran program pembangunan Pelabuhan perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebagai suatu *output* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran kegiatan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. “Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”, untuk mendukung Sasaran Program DJPT (Kesejahteraan nelayan meningkat).

Indikator kinerja :

Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (orang), dengan target 60 (enam puluh) pada tahun 2020 menjadi 65 (enam puluh lima) pada tahun 2021.

- b. “Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

Indikator kinerja :

Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp. Juta), dengan target Rp 478 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 508 juta pada tahun 2024.

- c. “Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”, untuk mendukung Sasaran Program DJPT (Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan).

Indikator kinerja :

Jumlah kapal perikanan yang menerapkan *logbook* penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (laporan), dengan target 20 (dua puluh) pada tahun 2020 menjadi 100 pada tahun 2024.

- d. “Produksi perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”, untuk mendukung SS-7 KKP (Produktivitas perikanan tangkap meningkat).

Indikator kinerja :

Jumlah produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (ton), dengan target 20.238 ton pada tahun 2020 menjadi 23.638 ton pada tahun 2024.

- e. “Peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”, untuk mendukung Sasaran Program DJPT (Produktivitas perikanan tangkap meningkat).

Indikator kinerja :

Jumlah pelabuhan perikanan UPT pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit), dengan target 1 (satu) pada tahun 2020 menjadi 1 (satu) pada tahun 2024.

- f. “Pengelolaan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berdaya saing dan berkelanjutan”, untuk mendukung Sasaran Program DJPT (Produktivitas perikanan tangkap meningkat).

Indikator kinerja :

Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (persen), dengan target 80 (delapan puluh) pada tahun 2020 menjadi 84 (delapan puluh empat) pada tahun 2024.

- g. “Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdayasaing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”, untuk mendukung Sasaran Program DJPT (Produktivitas perikanan tangkap meningkat).

Indikator kinerja :

Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang), dengan target 15 (lima belas) pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) pada tahun 2024.

- h. “Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”, untuk mendukung Sasaran Program DJPT (Produktivitas perikanan tangkap meningkat).

Indikator kinerja :

Persentase kapal perikanan berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, dengan target 75 (tujuh puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 75 (tujuh puluh lima) pada tahun 2024.

- i. “Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”, untuk mendukung Sasaran Program DJPT (Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DJPT).

Indikator kinerja :

1) IP ASN Pelabuhan Perikanan (indeks), dengan target 72 pada tahun 2020 menjadi 78 pada tahun 2021.

- 2) Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (nilai), dengan target 75 (tujuh puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2024.
- 3) Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (nilai), dengan target 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2024.
- 4) Tingkat kepatuhan pengelolaan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (persen), dengan target 72,25 pada tahun 2020 menjadi 72,25 pada tahun 2024.
- 5) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (persen), dengan target 72,25 pada tahun 2020 menjadi 72,25 pada tahun 2024.
- 6) Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (nilai), dengan target 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2020 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2024.
- 7) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (nilai), dengan target 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2020 menjadi > 90 pada tahun 2024.

Untuk meningkatkan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2021 terdapat perubahan IKU Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang diadopsi PPN Prigi sebagai berikut :

**Tabel 1. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

SASARAN / INDIKATOR		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Sasaran Program</b> : Kesejahteraan nelayan meningkat						
1	<b>Indikator Kinerja</b> : Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	102	103	105	106	107
a	<b>Indikator Kegiatan</b> : Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/ nelayan/bulan)	3.952	4.229	4.548	4.911	5.360
	1. Jumlah nelayan yang diidentifikasi sebagai penerima bantuan premi asuransi nelayan (orang);	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	2. Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan (orang);	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3. Jumlah fasilitasi nelayan yang terlindungi (orang);	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
	4. Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (orang);	2.250	2.400	2.550	2.750	3.000

	5. Jumlah Kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya (lokasi);	40	40	40	40	40
	6. Jumlah kampung nelayan maju (lokasi);	-	10	10	15	20
	7. Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	8. Jumlah fasilitasi Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) (bidang);	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	9. Jumlah keluarga nelayan yang diverifikasi usahanya (RTP).	2.900	4.000	5.000	6.000	7.000
<b>Sasaran Program</b> : Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan						
1	<b>Indikator Kinerja</b> : Proporsi tangkapan jenis ikan yang berasa dalam Batasan biologis yang aman (persen)	≤ 64	≤ 67	≤ 72	≤ 76	≤ 80
a.	<b>Indikator Kegiatan</b> : Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan (persen)	100	100	100	100	100
	1. Jumlah kapal perikanan yang menerapkan <i>logbook</i> penangkapan ikan (unit)	12.000	15.000	16.000	18.000	20.000
	2. Jumlah hari layer pemantauan oleh observer di atas kapal perikanan (hari layer)	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	3. Jumlah WPPNRI yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPPNRI)	11	11	11	11	11
<b>Sasaran Program</b> : Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab						
1	<b>Indikator Kinerja</b> : WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata Kelola (WPPNRI)	3	5	7	9	11
a.	<b>Indikator Kegiatan</b> : Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan dan ZEEI (persen)	100	100	100	100	100
	1. Jumlah laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola sumber daya ikannya (WPPNRI);	7	8	8	8	8
	2. Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen)	60	70	80	90	100
	3. Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPPNRI)	11	11	11	11	11
b.	<b>Indikator Kegiatan</b> : Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat	100	100	100	100	100
	1. Jumlah perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi)	25	29	33	37	41

<b>Sasaran Program : Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan</b>						
1	<b>Indikator Kinerja :</b> Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	8.020	8.421	8.891	9.343	10.105
a.	<b>Indikator Kegiatan :</b> Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	8.020	8.421	8.891	9.343	10.105
b.	<b>Indikator Kegiatan :</b> Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan (lokasi)	37	30	33	36	39
	1. Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) (lokasi)	7	7	7	7	7
	2. Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) (lokasi)	17	18	19	20	21
	3. Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) (lokasi)	12	3	4	5	6
	4. Jumlah pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (lokasi);	1	2	3	4	5
	5. Jumlah Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional (lokasi)	0	3	3	3	3
c.	<b>Indikator Kegiatan :</b> Tingkat operasional Pelabuhan perikanan (persen)	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
	1. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) (persen)	80	81	82	83	84
	2. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) (persen)	80	81	82	83	84
	3. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) (persen)	75	76	77	78	79
	4. Tingkat operasional pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (persen)	67	68	69	70	71
	5. Jumlah Pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya (lokasi)	20	25	30	35	40
d.	<b>Indikator Kegiatan :</b> Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar, dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	13.630	14.650	15.870	17.290	18.910
	1. Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan (unit)	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	2. Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit)	11.500	12.250	13.200	14.350	15.700
	3. Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit)	30	50	70	90	110
	4. Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit)	100	150	200	250	300
e	<b>Indikator Kegiatan :</b> Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Sandar Nasional Indonesia, sertifikasi dan Kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen)	16	23	30	37	44
f	<b>Indikator Kinerja :</b> Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	2.500	1.750	2.000	2.250	2.500

	1. Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2. Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit)	500	750	1.000	1.250	1.500
g.	<b>Indikator Kegiatan :</b> Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (orang)	12.600	13.700	14.800	15.900	17.000
	1. Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang ditetapkan (orang)	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	2. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang)	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
h.	<b>Indikator Kegiatan :</b> Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	100	100	100	100	100
	1. Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit)	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	2. Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya	2.219	2.543	2.593	2.663	2.753
	3. Jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi)	14	19	24	29	34
i.	<b>Indikator Kegiatan :</b> Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)	100	100	100	100	100
	1. Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);	10.500	10.600	10.650	10.700	10.750
	2. Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit)	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	3. Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan	34	34	34	34	34
2	<b>Indikator Kinerja :</b> Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab DJPT (skala kemandirian 1-5)	4	4	4	4	4
	1. Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (skala kemandirian 1-5)	4	4	4	4	4
	2. Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke (skala kemandirian 1-5)	4	4	4	4	4
	3. Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (skala kemandirian 1-5)	4	4	4	4	4
	4. Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Nunukan (skala kemandirian 1-5)	4	4	4	4	4

Sasaran Program : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan DJPT						
1.	<b>Indikator Kinerja :</b> Nilai PMPRB DJPT	30	31	32	33	34
2.	<b>Indikator Kinerja :</b> Indeks Profesionalitas ASN DJPT	72	73	74	75	76
3.	<b>Indikator Kinerja :</b> Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup DJPT (WBK) (satker)	8	9	10	11	12
4	<b>Indikator Kinerja :</b> Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) DJPT dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
5	<b>Indikator Kinerja :</b> Nilai PM SAKIP DJPT (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75
6	<b>Indikator Kinerja :</b> Level maturase SPIP DJPT (level)	3	3	3	3	3
7	<b>Indikator Kinerja :</b> Persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang tersatnadr lingkup DJOT (persen)	82	84	86	88	90
8.	<b>Indikator Kinerja :</b> Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPT (unit kerja)	60	65	70	75	80
9.	<b>Indikator Kinerja :</b> Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup DJPT (unit kerja)	1	1	1	1	1
10.	<b>Indikator Kinerja :</b> Nilai IKPA DJPT (nilai)	88	89	89	90	90
11.	<b>Indikator Kinerja :</b> Nilai Kinerja Anggaran DJPT (nilai)	85	86	87	88	89

### BAB III. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

#### A. POTENSI

Kelimpahan stok Sumber Daya Ikan akibat dari pembatasan *IUU Fishing*, intensifikasi alat tangkap ramah lingkungan, serta upaya *pro-environment* lainnya telah berhasil meningkatkan stok sumber daya ikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Secara factual, nelayan di beberapa lokasi pun telah merasakan kemudahan dalam usaha penangkapan ikan. Instrument pengelolaan perikanan berbasis WPP sejauh ini seluruh kondisi prasyarat utama dalam mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis WPP telah terpenuhi, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah disusun, penetapan dan operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP), maupun penetapan mekanisme pengaturan lainnya.

Daerah penangkapan *Fishing Ground* yang digunakan nelayan Prigi masih di wilayah Samudera Hindia (WPP 573) yaitu Teluk Prigi ( $111^{\circ} 43' 20''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 20''$  LS), Perairan Kabupaten Tulungagung ( $111^{\circ} 53' 20''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 40''$  LS), Perairan Pacitan ( $111^{\circ} 50' 10''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 40''$  LS), Perairan Blitar ( $111^{\circ} 09' 20''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 30''$  LS), dan Perairan Sadeng Yogyakarta ( $111^{\circ} 42' 10''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 40''$  LS). Hasil tangkapan ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi termasuk ikan pelagis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada musimnya, produksi perikanan tangkap mampu dikirim ke berbagai daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur maupun antar provinsi. Infrastruktur yang cukup memadai untuk kegiatan bongkar dan tambat kapal perikanan menambah potensi rasionalisasi armada kea rah ukuran yang lebih optimal dan mampu menjamin kesinambungan ketersediaan ikan di TPI PPN Prigi.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi harus meningkatkan ekstensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan internal maupun eksternal, sehingga dapat menggunakan kekuatan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui hal ini diperlukan suatu analisis lingkungan berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*).

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat diketahui unsur-unsur kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Keempat unsur tersebut harus dapat dianalisa untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **B. PERMASALAHAN**

Permasalahan pengelolaan perikanan tangkap, khususnya pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain sebagai berikut :

### 1) Kapasitas Nelayan

Kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan produktif dan efisien serta ramah lingkungan serta pengetahuan nelayan tentang Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perlu ditingkatkan.

### 2) Pengendalian Mutu Ikan Hasil Tangkapan

Terdapat berbagai isu terkait pengendalian mutu ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Prigi antara lain : sebagian besar kapal perikanan yang berpangkalan dan beraktivitas di PPN Prigi tidak membawa es untuk mempertahankan mutu ikan selama proses penanganan ikan mulai dari ikan ditangkap hingga pembongkaran. Selain itu penggunaan keranjang bambu untuk menampung ikan selama proses pembongkaran ikan juga menjadi salah satu penyebab kemunduran mutu ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Prigi.

### 3) Armada Kapal dan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan

Permasalahan yang terkait dengan armada kapal dan infrastruktur pelabuhan perikanan di PPN Prigi antara lain : belum optimalnya infrastruktur pelabuhan perikanan, konektivitas sistem informasi yang kurang, struktur armada kapal yang didominasi oleh kapal kecil dengan jangkauan terbatas, minimnya armada kapal perikanan yang memenuhi laik tangkap dan lain simpan, kurangnya pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang *reliable*, minimnya penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien.

### C. LINGKUNGAN STRATEGIS

Pembangunan perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal dan eksternal untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasikan ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah perumusan alternatif arah kebijakan.

**Tabel 2. Matriks SWOT di Lingkup PPN Prigi**

	<b>Strengths/ Kekuatan (S)</b>	<b>Weakness / Kelemahan (W)</b>
Faktor Internal Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infrastruktur PPN Prigi bisa menampung produksi rerata 90-100 ton/hari (tahun 2018, produksi 28.472 ton dibagi 276 hari kerja)</li> <li>2. Posisi PPN Prigi terletak di dalam Teluk Prigi yang luas dan terlindungi untuk kegiatan Pelabuhan perikanan di pantai selatan Jawa;</li> <li>3. Ketersediaan lahan PPN Prigi seluas 14,1 Ha, lahan terpakai 9,8 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 68%</li> <li>4. Tersedianya SDM pengelola yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Over capacity</i> untuk tambak dan labuh kapal-kapal di kolam 1 dan 2 (sejauh 705 kapal dengan ukuran &lt; 30 GT)</li> <li>2. Infrastruktur belum memadai untuk kapal &gt; 30 GT (dermaga, <i>jetty</i>, <i>breakwater</i>, pabrik es, dan fasilitas pendukung lainnya)</li> <li>3. Mutu ikan hasil tangkapan masih rendah (palka kapal tidak berinsulasi / tidak membawa es) dan belum menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik</li> <li>4. Kelaiklautan kapal penangkap ikan terkendala pengurusan dokumen kapal yang diterbitkan Ditjen Hubla/ KSOP terkait</li> <li>5. Terbatasnya akses transportasi karena melewati pegunungan.</li> </ol>
<b>Opportunities / Peluang (O)</b>	<b>Strategi S-O (Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)</b>	<b>Strategi W-O (Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumberdaya ikan di WPP 573 masih terbuka pemanfaatannya</li> <li>2. Dukungan program Pemda Trenggalek mewujudkan “Prigi menjadi Kota Maritim Baru” dalam konsep keruangan dan hubungan antar fungsi (Kawasan perkotaan, Pelabuhan laut, perikanan, dan Kawasan wisata)</li> <li>3. Industrialisasi PPN Prigi (PPN Prigi sebagai pusat pertumbuhan industry / bisnis kelautan dan perikanan) di wilayah selatan Jawa Timur</li> <li>4. PPN Prigi menjadi alternatif Pelabuhan Pangkalan bagi kapal-kapal yang merubah alat tangkap akibat penerapan Permen KP 02/2014 (eks Cantrang menjadi Purse Seine)</li> <li>5. Keberadaan Perum Perindo dalam memfasilitasi pemasaran pada saat puncak musim penangkapan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong Perum Perindo berperan sebagai penyangga dalam stabilitas harga ikan (S2;S3;S4;O5)</li> <li>2. Menumbuhkan industri pengolahan perikanan (S1;S3;O1;O2;O3)</li> <li>3. Rasionalisasi dan modernisasi kapal penangkap &gt; 30 GT untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEEI yang dilengkapi dengan system pendingin / refrigerasi (S1;S2;O1)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan <i>breakwater</i> untuk kapal &gt; 30 GT (membuat kolam labuh baru) )W1;W2;O1;O4)</li> <li>2. Mengupayakan palkanisasi dan mengganti keranjang bambu menjadi <i>trays</i> dan melaksanakan pembinaan pasca panen <i>Good Handling Practices</i> (GHdP) (W2;W4;O2;O4)</li> <li>3. Melakukan perbantuan/fasilitasi perizinan kapal perikanan kepada pemilik kapal secara kolektif (W3;W4;O2;O4)</li> <li>4. Pembangunan pabrik es oleh Perum Perindo / investor (W2;O3;O5)</li> </ol>

<b>Threats / Ancaman (T)</b>	<b>Strategi S-T</b> (Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman)	<b>Strategi W-T</b> (Gunakan kelemahan dan menghindari ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat beberapa fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang yang mengalami kerusakan fisik dan kemunduran fungsi</li> <li>2. Pada saat puncak musim penangkapan, masih terjadi kekurangan <i>supply</i> es sehingga hasil tangkapan ikan tidak memenuhi kualitas mutu</li> <li>3. Anggaran untuk renovasi berat dan pengembangan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang masih belum tersedia</li> <li>4. Keterbatasan fasilitas / infrastruktur / instalasi penyaluran BBM (SPDN) di Kawasan PPN Prigi</li> <li>5. <i>IUU Fishing</i> terkait hambatan pengurusan SIUP dan SIPI karena penyesuaian terhadap kebijakan pemberlakuan system OSS dalam perizinan usaha perikanan tangkap kewenangan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan infrastruktur perluasan kolam untuk kapal &gt; 30 GT, dermaga, pelebaran alur dan fasilitas navigasi pelayaran dan pendukung lainnya (S2;S3;S4;T1;T3)</li> <li>2. Memfasilitasi berkembangnya investasi baru di Kawasan PPN Prigi (pabrik es curah/ <i>dry ice</i>) (S1;S3;T2)</li> <li>3. Restrukturasi infrastruktur / instalasi SPDN mengacu pada standar Pertamina dan keselamatan / tertib bandar dan keselamatan maritim (S3;S4;T4)</li> <li>4. Mengupayakan peran aktif Cabang Dinas DKP Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Kabupaten Blitar untuk memfasilitasi pengurusan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (S4;T5)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan system zonasi aktivitas kapal perikanan berdasarkan ukuran dan jenis alat tangkap, serta mengendalikan kegiatan andon penangkapan ikan (W1;T1;T3)</li> <li>2. Membatasi jumlah kapal ukuran &gt; 30 GT untuk melakukan tambat labuh di kolam labuh yang ada untuk sementara waktu (W2;T3)</li> <li>3. Mengupayakan pelayanan BBM menggunakan SPBUN tarapung (<i>Floating Bunker</i>) (T2;T1;T3;T4)</li> <li>4. Meningkatkan koordinasi serta perbantuan perizinan kapal perikanan dengan Kemenhub / KSOP untuk pengurusan dokumen kapal (W3;T5)</li> <li>5. Mengupayakan distribusi hasil tangkapan ikan melalui jalur laut dengan kapal <i>collecting</i> (pengangkut) yang dilengkapi <i>refrigerant</i> (W2;W4;T2)</li> </ol>

## **BAB IV. KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

### **A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap berbasis pengelolaan WPP secara tidak langsung mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin siaraskan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistic ikan, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Artinya, pelabuhan perikanan memiliki tanggungjawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas Pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan serta ditingkatkan perannya.

Implementasi pengembangan infrasturktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi dengan mengedepankan *outcome* berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sector, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum, arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing, termasuk integrasinya dengan sector terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan / transportasi. Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) Pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) Pusat layanan dan pendataan serta ketelusuran yang maju, andal, dan akuntabel, serta 3) *Eco Fishing Port* , yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan.

Dalam upaya fasilitasi infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, secara umum arah kebijakan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2020-2024 dengan beberapa indikator kegiatan dan kebijakan strategi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui *eco fishing port*, termasuk didalamnya penguatan instrument SHTI;
2. Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dnegan system pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
3. Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN), baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui system IT, termasuk

melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;

4. Peningkatan kualitas pelayanan

Dalam pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan terhadap pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan (Pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan; Penerbitan SLBLKK; Pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan; Pelayanan penerbitan SPB; Penerbitan SHTI); pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha; pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; bimbingan teknis dan penerbitan SCPIB dan pelaksanaan Inspeksi Pengendalian Mutu, maka upaya peningkatan pelayanan terhadap aktivitas tersebut terus diupayakan secara optimal.

Kebijakan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam peningkatan kualitas pelayanan tersebut ditempuh antara lain melalui upaya penerapan *Standard Operasional Procedure* (SOP); peningkatan kapasitas SDM Pelabuhan melalui diklat, bimtek, dll; penyediaan peralatan pendukung pelayanan; pemasangan papan pelayanan dan informasi pelayanan; penyebaran data dan informasi; pertemuan / sosialisasi dengan *stakeholder*; sosialisasi ketentuan / peraturan yang terkait dengan pelayanan Pelabuhan, serta melaksanakan *survey* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pelabuhan dan melakukan *review* SOP secara berkala.

5. Peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan

Upaya peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan terus diupayakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kepelabuhanan. Peningkatan sarana dan prasarana diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha perikanan maupun usaha pendukung lainnya sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, perkembangan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan tersebut meliputi penyempurnaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan antara lain yang dilakukan secara berkala.

6. Pengembangan sistem informasi perikanan

Kebijakan pengembangan sistem informasi pelabuhan perikanan diarahkan pada peningkatan kualitas, akurasi data sebagai informasi pelabuhan perikanan di PPN Prigi dengan beberapa ragam informasi, baik dalam bentuk buku *statistic*, *leaflet* maupun

poster dengan pengembangan jejaring distribusi informasi melalui medias sosial, serta peningkatan *update* data pada system Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.

7. Penguatan manajemen resiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam)

## **B. PROGRAM PEMBANGUNAN**

Pembangunan perikanan tangkap sebagai bagian penting dari pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk mewujudkan 4 (empat) pilar pembangunan nasional, yaitu *pro-poor* (penanggulangan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembangunan perikanan tangkap dilaksanakan melalui 1 (satu) program yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan, yaitu : 1) Pengelolaan sumber daya ikan; 2) Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan; 3) Pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan; 4) Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan; 5) Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil; dan 6) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Ditjen Perikanan Tangkap. Program pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mengacu pada kebijakan strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

## **C. KERANGKA PENDANAAN**

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN). Secara terperinci, kerangka pendanaan menurut program dalam kegiatan sebagaimana Lampiran 1.

## **BAB V. PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang telah disusun Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dengan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang telah disesuaikan dengan perubahan pada visi, misi, strategi dan kebijakan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, Peraturan Presiden No.2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Renstra ini menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) serta merupakan acuan perencanaan setiap tahun.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, tapi yang lebih penting adalah pelaksanaan dari dokumen Renstra dimaksud dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dalam pengembangan PPN Prigi dan masyarakat luas.

Kerjasama dan kerja keras dari jajaran staf PPN Prigi dan seluruh pemangku kepentingan di bidang perikanan tangkap pada umumnya merupakan hal yang mutlak dalam rangka mewujudkan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan.

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA RENSTRA UPT PPN PRIGI

PERIODE TAHUN 2020-2024

(Revisi-1)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (orang)	12	12	15	20	25
2	Ekonomi sector perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2	Nilai PNBPN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp. Juta)	478	484	491	499	508
3	Tata Kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	3	Jumlah laporan data <i>logbook</i> penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	20	40	60	80	100
4	Produksi perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	4	Jumlah produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	20.238	21.088	10.000	22.788	23.638
5	Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	5	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (Unit)	1	1	1	1	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berdaya saing dan berkelanjutan	6	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	80	81	82	83	84
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	7	Jumlah nelayan / awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (orang)	-	15	20	25	30
8	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8	Persentase kapal perikanan berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (persen)	75	75	75	75	75
9	Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9	IP ASN Pelabuhan Perikanan (indeks)	72	73	75	76	78
		10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (nilai)	75,07	75,07	75,07	75,07	75,07
		11	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (nilai)	85	85,15	85,25	85,50	85,75
		12	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (persen)	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
		13	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (persen)	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
		14	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (nilai)	85	86	87	88	89
15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (nilai)	88	89	89	90	90		